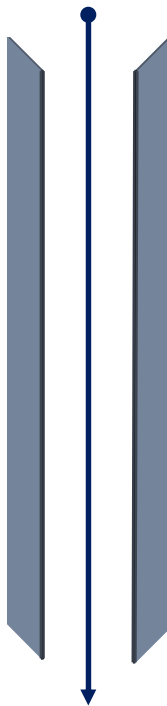




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018



**DPMPTSP&TK
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II	16
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD	9
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD.....	12
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	13
BAB III	14
TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	14
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	14
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	17
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPSTP&TK	17
BAB IV	20

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 SUMBER DAYA MANUSIA SESUAI ESELON	34
TABEL 2. 2 JUMLAH PEGAWAI SESUAI GOLONGAN/PANGKAT	35
TABEL 2. 3 JUMLAH PEGAWAI SESUAI TINGKAT PENDIDIKAN.....	36
TABEL 2. 4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	37
TABEL 2. 5 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	38
TABEL 3. 1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD...	44
TABEL 3. 2 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL).....	44
TABEL 3. 3 PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	53
TABEL 3. 4 PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN ANALISIS KLHS BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA.....	55
TABEL 3. 5 SKOR KRITERIA PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	57
TABEL 3. 6 NILAI SKALA KRITERIA	58
TABEL 3. 7 RATA-RATA SKOR ISU-ISU STRATEGIS.....	59
TABEL 4. 1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD	62
TABEL 4. 2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	65
TABEL 5. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	

KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

Dalam Penyusunan Rencana kerja ini, masih terdapat beberapa kendala kendala yang di hadapi namun berkat ketekunan semua staf akhirnya semua kendala dapat di atasi dan penyusunan Rencana Kerja ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang di tentukan. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.-

Terima Kasih

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO



Drs. RUSLIY MOKODONGAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621226 199007 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG
------------	-----------------------

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini di laksanakan dalam rangka Pembangunan Daerah yang memanfaatkan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya asing maupun peningkatan indeks Pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka tertentu. Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode satu yang dinamakan Rencana Kerja (RENJA) – SKPD sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Rencana Kerja (RENJA) SKPD ini menerjemahkan Perencanaan strategis lima Tahunan yang dituangkan dalam RENSTRA SKPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih Operasional. Perencanaan Pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan , responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah . Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango tahun 2018 di susun dalam rangka mengimplementasikan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bone Bolango Periode 2016 – 2021 dengan memperhatikan hasil yang telah di capai, kebijakan Pemerintah Pusat , Kebutuhan kebutuhan

masyarakat dan Pemangku kepentingan dan perubahan lingkungan strategis.

Kualitas Dokumen Renja sangat di tentukan oleh kualitas Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan di laksanakan sehingga Penyusunan Renja SKPD sangat di tentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplemntasikan , mengandalikan dan mengevaluasi capaian Program dan Kegiatan sesuai Tugas pokok dan Fungsi SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pemebentukan Provinsi ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – undang Nomor 33 Taahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Undang – undang Nomor 17 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 2014 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 221) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
10. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango ;

1.3	MAKSUD DAN TUJUAN
------------	--------------------------

Rencana Kerja 2018 di susun dengan maksud : (1) sebagai acuan dasar bagi Dinas Perencanaan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih terencana, terarah dan terkendali serta dinamis dalam mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi (2) sebagai pedoman dalam upaya peningkatan investasi dan (3) sebagai instrumen untuk pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango 2018 yaitu : 1) Meningkatkan kinerja institusi dan pegawai, 2) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan , pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi program serta kegiatan dan 3) Meningkatkan sinkronisasi program peningkatan investasi antar institusi dan antar pemerintahan Pusat Provinsi, dan kabupaten / Kota.

1.4	SISTEMATIKAN PENULISAN
------------	-------------------------------

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2017 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- C. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- D. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

- A. Kebijakan Strategis
- B. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
- C. Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

Kesimpulan Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP&TK TAHUN LALU

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pencapaian Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango 2018 dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja Tahun kedepan dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran melalui Tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi Indikator Masukan (inputs), Keluaran (outputs), hasil (outcomes), Manfaat (Benefit) dan Dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikatornya. Penetapan Masing masing jenis Indicator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggambarkan Indikator Kinerja kegiatan Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2018. Adapun Program dan

Kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai pagu Anggaran yang ditetapkan Tahun 2018

1. Program : Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
 Kegiatan : - Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
 - Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah
 Anggaran : - Rp. 493.295.000,-
 Realisasi : - Rp. 239.300.034,-
 Prosentasi : - 48.51%
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Kegiatan : - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan /Peralatan Gedung kantor
 Anggaran : - Rp. 366.005.000,-
 Realisasi : - Rp. 76.726.800,-
 Prosentase : - 20.96%
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
 Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas,pakaian Khusus,dan Pakaian Kerja Lapangan
 Anggaran : - Rp. 32.250.000,-
 Realisasi : - Rp. 19.211.000,-
 Prosentasi : - 60%
4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan Formal
 Anggaran : - Rp. 10.000.000,-
 Realisasi : - Rp. 4.820.000,-
 Prosentasi : - 48%
5. Program : Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 Kegiatan : - Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 Anggaran : - Rp. 12.000.000,-
 Realisasi : - Rp . 6.935.000,-
 Prosentasi : - 58%
6. Program : Progam Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 Kegiatan : - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

- Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMND/PMA
- Penyelenggaraan pameran investasi
- Anggaran : - Rp. 112.755.000,-
- Realisasi : - Rp. 67.493.600,-
- Prosentasi : - 60%
- 7. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Kegiatan : - Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- Anggaran : - Rp. 222.225.000
- Realisasi : - Rp. 220.625.742
- Prosentasi : - 99%
- 8. Program : Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Kegiatan : - Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
- Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- Anggaran : - Rp. 219.950.000,-
- Realisasi : - Rp. 40.514.600,-
- Prosentasi : - 18.41%
- 9. Program : Peningkatan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
- Anggaran : - Rp. 27.355.000,-
- Realisasi : - Rp.
- Prosentasi : -
- 10. Program : Peningkatan Kesempatan Kerja
- Kegiatan : - Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan berbasis masyarakat
- Anggaran : - Rp. 48.970.000,-
- Realisasi : - Rp. 2.310.000,-
- Prosentasi : - 5%
- 11. Program : Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Kegiatan : - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Anggaran : - Rp. 42.320.000,-

Realisasi : - Rp. 13.275.000,-

Prosentasi : - 31.36%

Pada Tahun 2016 Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango mendapatkan Alokasi Anggaran APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 1.570.000.- Anggaran tersebut dialokasikan untuk mempunyai 8 Program dan 16 Kegiatan Dari jumlah dana tersebut terealisasi saat ini sebesar Rp. 1.499.597.597,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96%.

Untuk hasil evaluasi capaian Renja DPMPTSPK Kabupaten Bone Bolango dapat di lihat pada ***Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja SKPD (Terlampir)***

2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN DPMPTSPK KABUPATEN BONE BOLANGO
------------	---

Tuntutan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas saat ini telah menjadi komitmen bersama ,hal ini tidak berlebihan karena sesuai dengan amanat undang – undang Dasar 1945 , Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka Pelayanan Publik.-

Dalam Upaya meningkatkan kualitas dan Jaminan penyediaan pelayanan publik ini lahirlah terobosan-terobosan berbentuk pearturan Perundangan . Sebagai Contoh disahkannya Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang Palayanan Publik. Demikian hanya terobosan dalam upaya Peningkatan Pelayanan Publik terkait Investasi. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait Pelayanan Perijinan Usaha Seperti Inpres No.3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi,Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang penanaman Modal . Bahkan pada Tahun 2010 ditandatangani Surat Edaran bersama 3 (Tiga) Menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (No.570/3727A/SJ, No.SE/08/M.PAN-RB/9/2010, NO.12 Tahun 2010)tentang Pelaksanaan Pelayanan penanaman Modal.

Berbagai terobosan menjadi ukuran Kinerja Pemerintah. Masyarakat saat ini kian memahami hak – haknyadan berani bersuara untuk menuntut jika mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang di janjikan . Kondisi ini mendorong perlunya praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanannya.

Peningkatan Kinerja Pelayanan adalah tugas yang harus dilaksanakan terus menerus maka Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango , berkomitmen untuk melaksanakan Pelayanan bermutu tinggi kepala investor dan masyarakat berdasarkan Standard Operasional Procedures (SOP) secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektifitas,efisiensi, dan akuntabilitas Pelayanan Publik sesuai dengan peratutaran perundang-undangan mengenai Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tinbngkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan di hitung dan di ukur serta di gunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan ,tahap pelaksanaan maupun setelah tahap kegiatan selesai selesai dan berfungsi . Selain itu indikator kinerja di gunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau SKPD yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan atau menuju tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

Untuk mewujudkan Transaparasi dan Akuntabilitas maka Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja kabupaten Bone Bolango akan membuat laporan Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran berupa Keluaran kegiatan dan Indikator Kinerja masing – masing kegiatan. Ada Beberapa Indikator Kinerja yang sering dipergubakan dalam pengukuran kinerja organisasi yaitu :

1. Indikator masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapar berupa Dana, sumberdaya manusia , informasi Kebijaksanaan / Peraturan Perundang – undangan dsb.
2. Indikator Keluaran (Outout) adalah sesuatu yang di harapkan langsung di capai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator Hasil (outcome) adalah sesuatu yang menggambarkan berfungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah

4. Indikator Manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

2.3	ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
------------	--

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dalam mengelola pelayanan perijinan yang berdampak pada belum tercapainya beberapa indikator pelayanan publik. Selanjutnya dalam rangka penilaian kelembagaan pelayanan publik, ukuran yang umum digunakan dalam penilaian pelayanan publik adalah merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Berdasarkan isu tersebut, sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dalam mengelola pelayanan publik dibidang perijinan Tahun 2016. Upaya untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango akan sangat tergantung pada faktor yang ada didalam (internal) maupun faktor diluar (eksternal). Dalam mencermati potensi, aspek tinjauan yang perlu dilakukan adalah berbagai faktor kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak tapi memungkinkan untuk didayagunakan menjadi faktor yang nyata (visible) melalui berbagai upaya. Pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi menjadi fokus tinjauan, baik aspek legal keberadaan DPMPTSP&TK, kelembagaan / organisasi, tatalaksana, maupun sumber daya manusia (SDM) pegawainya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan, Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Upaya untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam rangka mengemban misi untuk mewujudkan visi dimasa depan. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten bone bolango beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada ***Tabel. 2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD dan Tabel 3. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)***

2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
------------	--

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi subsatansi Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam rancangan awal RKPD, Karena pada hakekatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahaan terhadap Rancangan Awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja disajikan Dalam ***Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD***

2.5	PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
------------	--

Dalam menyusun Renja SKPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai Salah Satu SKPD dalam lingkungan Pemerintah kabupaten Bone Bolango, Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2016. Aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017. Seatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien. Berikut ini adalah tabel Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat :

Tabel 5.
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

NO	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH DANA (Rp)	LEMBAGA ORGANISASI MASYARAKAT	KET
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN ,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasar undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 13 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis. Visi memberikan gambaran atau pandangan tentang keadaan masa depan dengan memuat cita dan citra yang bersifat antisipatif, inovatif dan produktif yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman terhadap dinamika organisasi, cita, citra dan peran organisasi sehingga menimbulkan motivasi untuk meraihnya atau mewujudkannya.

Pernyataan Visi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Naker adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA
DALAM MENDUKUNG IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF”**

Penjelasan Visi :

1. Visi adalah cara pandang jauh kedepan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP TK) dalam kurun waktu tertentu.
2. **Pelayanan Perizinan Prima** artinya Kemudahan dalam memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima, melalui 5 budaya kerja yaitu pelayanan cepat, mudah, ramah, bernilai dan beradab yang diwujudkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas dengan motto “Pelayanan Cemerlang”
Pelayanan Perizinan Prima yakni memberikan pelayanan perijinan secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu :
 - a. Kesederhanaan prosedur, pelayanan diselenggarakan dengan cara yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit.
 - b. Kejelasan dan kepastian, adanya kejelasan dan kepastian prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian.

- c. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
- d. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tatacara, persyaratan, tarif dan lainnya mudah diketahui dan difahami masyarakat, baik diminta maupun tidak.
- e. Efisien, persyaratan pelayanan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dihindari pengulangan kelengkapan persyaratan.
- f. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan keadaan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dan diperlakukan secara adil.
- h. Ketepatan waktu, dalam arti pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Misi

Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sebagaimana, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dapat dirumuskan Misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dibawah ini :

- a. Menciptakan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang berkualitas untuk meningkatkan realisasi investasi ;
- b. Menciptakan Tenaga Kerja yang terampil, Produktif dan transmigran yang berkualitas

Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagai mana telah kami kemukakan yaitu :

- 1) Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
- 2) Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perijinan melalui berbagai diklat baik di daerah maupun pusat.
- 4) Meningkatkan Pelayanan dengan menggunakan system Teknologi yang berbasis intranet dan Online.

- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perijinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
- 6) Menyusun rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan lainnya sebagai dasar pelaksanaan pelayanan Perizinan.
- 7) Mengembangkan kerjasama dengan Pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- 8) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDA Aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango adalah :

- 1) Membangun sistim dan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perijinan.
- 2) Mengembangkan sistim informasi perijinan berbasis teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan dayaguna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- 4) Menyempurnakan sistim dan prosedur pelayanan perijinan dengan mengacu pada prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, kemudahan akses, kenyamanan, kewilayahan dan kedisiplinan serta keramahmatan pelaksana pelayanan.
- 5) Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan.
- 6) Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel;
- 7) Penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan perijinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan;
- 8) Menciptakan jejaring kerja di bidang perijinan dengan memantapkan kerjasama antar *steakholder* yang terkait dengan perijinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.
- 9) Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perijinan melalui diklat, bintek dan seminar pelayanan publik;

- 10) Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perijinan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan Implementasi dari misi organisasi, Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan di capai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh unit - unit kerja dalam suatu organisasi . penetapan tujuan tidak mutlak harus di ukur atau kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan di capai di masa mendatang.

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi . Fokus Utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus , bersifat spesifik, terinci dan dapat di ukur.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya peluang Investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ;
2. Mewujudkan Tenaga Kerja berkualitas, Produktif dan tersedianya perluasan, Penempatan Tenaga kerja

Untuk lebih jelasnya telah dirumuskan tujuan, sasaran Renja SKPD Mengacu pada Renstra DPMPTSPK Kabupaten Bone Bolango pada ***Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD (Terlampir)***

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DPMPTSPK

Ada 8 (delapan) Program dan 17 (tujuh Belas) kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran**
 - a. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran
 - b. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Khusus dan Pakaian Kerja Lapangan
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
 - a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
 - b. Penyelenggaraan Pameran Investasi
 - c. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
 - d. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
 - e. Kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja dan Aparatur Penanaman Modal
 - f. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
- 7. Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
 - a. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- 8. Program Peningkat Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
- 9. Program Kesempatan Kerja**
 - a. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
- 10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**
 - a. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang

Ketenagakerjaan

b. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat Pada ***Tabel 7. Program dan Kegiatan SKPD tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 (Terlampir)***

BAB IV

PENUTUP

Demikian Revisi Rencana Kerja (RENJA) 2017 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ini di sampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2016 – 2021 dan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2016 – 2021.

Terkait dengan penyiapan dokumen perencanaan pembangunan ditingkat skpd, DPMPTSPTK telah menyusun Renstra DPMPTSPTK Kabupaten Bone Bolango 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, Tugas pokok dan fungsi DPMPTSPTK.

Renja Tahun 2017 ini di samping menggambarkan mengenai capaian Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya guna sebagai acuan dalam Penyusunan Program dan kegiatan 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSPTK ini sangat bergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf DPMPTSPTK. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat dan kekuatan serta disiplin semua unsur DPMPTSPTK, melalui pemberian dukungan penuh terhadap pelaksanaannya serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja DPMPTSPTK juga tergantung kepada keseriusan segenap unsure DPMPTSPTK dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2017, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Pada akhirnya keberadaan dari rencana Kerja ini menjadi salah satu alat mediator yang di kategorikan prime sistem di dalam struktur penyusunan anggaran Tahun 2017 serta mempunyai nilai ekonomis terhadap efisiensi laporan.

Hal hal yang di capai dengan baik tetap dipertahankan sementara program yang belum berjalan dengan baik perlu di lakukan penyempurnaan penyempurnaan di masa mendatang .

Demikianlah Revisi Rencana Kinerja ini dibuat dengan harapan penyajian sistematika ini dapat memberikan kontribusi masukan (input) terhadap kebijakan pemerintah, terutama Peningkatan pelayanan perijinan. Semoga mampu meningkatkan kinerja DPMPTSP TK dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO



Drs. RUSLIY MOKODONGAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621226 199007 1 002

LAMPIRAN

TABEL 1.
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPM-PTSP KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Terwujudnya pemanfaatan teknologi manajemen sistem pelayanan perizinan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi manajemen sistem pelayanan pewrizinan	100%	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penyusunan sistenm informasi terhadap layanan publik	Masukan : Dana	Rp.	144.600.000,00	117.770.000,00
						Keluaran : Tersedianya Perangkat TI	Software	1	1
						Hasil : Peningkatan Pelayana Perizinan	%	100	100%
2	Terwujudnya pelaksanaan promosi investasi dan investasi daerah	Meningkatnya promosi investasi dan investasi daerah	100%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Masukan : Dana	Rp.	36.675.000,00	31.675.000,00
						Keluaran : Tersedianya data Potensi unggulan daerah	Kegiatan	1	1
						Hasil : meningkatnya Penyebaran Informasi Data Potensi	%	100	100%
					Koordinasi Antar Lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	Masukan : Dana	Rp.	40.795.000,00	23.865.000,00

					Keluaran : Tersedianya Buku Profil Investasi PMA, PMDN dan Non PMDN	Kegiatan	1	1
					Hasil : Tersajinya Informasi Data PMA, PMDN dan Non PMDN	%	100	100%
				Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Masukan : Dana	Rp.	34.920.000,00	34.475.000,00
					Keluaran : Jumlah Aparatur yang di tingkatkan Kualitas SDMnya	Tahun	1	1
					Hasil : Tersedianya Aparatur yang berkualitas	%	100	100%
				Penyelenggaraan Pameran Investasi	Masukan : Dana	Rp.	19.400.000,00	13.375.000,00
					Keluaran : Pameran Investasi yang diikuti	Kegiatan	1	1
					Hasil : Terlaksananya promosi potensi investasi daerah	%	100	100%
				Pengawasan dan Evaluasi kinerja dan Aparatur BPMD	Masukan : Dana	Rp.	38.240.000,00	25.170.000,00
					Keluaran : Dokumen Pengaduan PMA, PMDN dan Non PMDN	Kegiatan	1	1
					Hasil : Tersedianya Dokumen Pengaduan PMA, PMDN dan Non PMDN	%	100	100%

					Peningkatan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	Masukan : Dana	Rp.	61.760.000,00	23.980.000,00
						Keluaran : Kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan PM	Kegiatan	3	3
						Hasil : Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan PM	%	100	63%
3	Terlaksananya peningkatan investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	100%	Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Masukan : Dana	Rp.	222.225.000,00	143.429.342,00
						Keluaran : Jumlah Perizinan yang ditindak lanjuti	izin / dokumen	1000 / 10	1000 / 10
						Hasil : 1000 Izin / 10 Dokumen	%	100	65%
4	Terlaksananya pelayanan adminsitasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja aparatur	100%	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	Masukan : Dana	Rp.	422.549.000,00	128.717.669,00
						Keluaran : jumlah Belanja Operasional Layanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1	1
						Hasil : Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100%

					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	Masukan : Dana	Rp.	99.813.000,00	87.916.100,00
						Keluaran : jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tahun	1	1
						Hasil : ASN yang berkualitas	%	100	100%
5	Sarana dan Prasaran Perkantoran	Peningkatan sarana penunjang kinerja aparatur dalam mejalan tugas sehari-hari	100%	Program Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur	Pengadaan Dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Masukan : Dana	Rp.	228.500.000,00	214.625.000,00
						Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor yang diadakan	Unit	5	4
						Hasil : Tersedianya Kendaraan Dinas dan peralatan Kantor	%	100	80%
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Masukan : Dana	Rp.	132.831.000,00	74.887.100,00
						Keluaran : jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	9	9
						Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas	%	100	100%
6	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur daerah BPMPTSP	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur daerah BPMPTSP	100%	Program Peningkatan disiplin aparatur	pengadaan pakaian Dinas, pakaian Khusus dan pakaian kerja lapangan	Masukan : Dana	Rp.	19.050.000,00	18.750.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BONE BOLANGO**

Nama SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2018			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			JUMLAH				
1.16.1	Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	DPMPTSP&TK		Rp 683.104.118	DAU	
1.16.1.1	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Belanja Operasional Layanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP&TK	12 Bulan (Honorarium PNSD,Honorarium Non PNSD, ATK, Alat Listrik, Kebersihan Kantor, rekening Telepon, Rekening Listrik, Rekening Air, Surat Kabar, TV kabel/Internet/TV Satelit, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman	557.107.740	DAU	
1.16.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	DPMPTSP&TK	12 Bulan (Rapat-rapat Koordinasi Kedalam daerah, Rapat-rapat Koordinasi Keluar daerah)	125.996.378	DAU	
1.16.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan peruntukannya	DPMPTSP&TK		Rp 399.194.303		
1.16.2.5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas dan operasional lapangan	DPMPTSP&TK	16 Unit (Perawatan Kendaraan dinas)	140.000.000	DAU	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.16.2.24	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	DPMPTSP&TK	10 unit	259.194.303	DAU	
1.16.3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase peningkatan disiplin aparaturnya	DPMPTSP&TK		Rp 113.800.000	DAU	
1.16.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari	DPMPTSP&TK	80 Orang	56.000.000	DAU	
1.16.3.5	Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari	DPMPTSP&TK	80 Orang	28.900.000	DAU	
1.16.3.5	Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas Kerja Lapangan	DPMPTSP&TK	80 Orang	28.900.000	DAU	
1.16.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase capaian ASN yang ditingkatkan kompetensinya	DPMPTSP&TK		Rp 100.000.000		
1.16.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP&TK	5 Kegiatan (Bimtek Keuangan, Bimtek Perencanaan, Bimtek E-Monev, Bimtek	100.000.000	DAU	
1.16.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan tahun	DPMPTSP&TK		Rp 36.288.000	DAU	
1.16.6.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	DPMPTSP&TK	6 Dokumen (Renja, RKA, LPPD, Lakip, Laporan Capaian Kinerja)	Rp 23.388.750	DAU	
1.16.6.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dibuat	DPMPTSP&TK	2 Laporan Keuangan	Rp 12.899.250	DAU	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DPMPTSP&TK	7%	#REF!		
1.16.15.2	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Buku Profil Promosi Potensi Unggulan Daerah yang Dibuat	DPMPTSP&TK	75 Buku Profil	Rp 100.000.000	DAU	
	Promosi Potensi Unggulan daerah melalui media cetak Nasional.			2 Media Cetak Nasional	Rp 100.000.000		
1.16.15	#REF!	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan antara investor dan pemerintah	DPMPTSP&TK	1 Dokumen RUPM / 16 PMA dan PMDN	Rp 270.000.000	DAU	
	Pembuatan RUPM (Rancangan Umum Penanaman Modal) dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang		DPMPTSP&TK		Rp 20.000.000		
	Temu Investor		Gorontalo	1 kali	Rp 250.000.000		
1.16.15.9	Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan	Jumlah Peserta Bimtek Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	4 Orang	Rp 88.499.300	DAU	
	Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Magang SPIPISE		Bone Bolango	4 Orang	Rp 38.499.300		
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pameran yang diikuti	Jakarta	2 Pameran	Rp 50.000.000		
1.16.15.10	Pameran Investasi	Jumlah Pameran yang diikuti	DPMPTSP&TK	2 Pameran	Rp 50.000.000	DAU	
	Peningkatan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	Jumlah Perusahaan PMA, PMDN yang Diawasi	Bone Bolango	30 Perusahaan	Rp 50.000.000		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap PMA dan PMDN		DPMPTSP&TK	30 Perusahaan	Rp 50.000.000	DAU	
	Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi	Rata-rata Penyelesaian Izin Sesuai SOP		1280			
1.16.16	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Waktu Penyelesaian Izin sesuai SOP	DPMPTSP&TK	128 Menit	Rp 80.000.000		
	Pengembangan Jaringan Sistem Infomasi Pelayanan Perizinan		DPMPTSP&TK	1 Jaringan Aplikasi	Rp 50.000.000	DAU	
	Pengembangan Sarana Prasarana Pelayanan Perizinan			2 unit	Rp 30.000.000		
	Kegiatan : Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan	Jumlah Izin Yang terbit		1280 Izin	Rp 140.000.000		
1.16.16.6	Investigasi Permohonan Perijinan		Bone Bolango	800 Lokasi izin Usaha	Rp 70.000.000	DAU	
	Peningkatan Prosedur Pelayanan Perizinan			1280 Izin	Rp 70.000.000		
	Program : Peningkatan Kualitas dan			12 Bulan	Rp 50.000.000		
	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari	Prosentase Pencari Kerja yang ditingkatkan kualitasnya			#REF!		
	Sub Kegiatan : Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Berbasis kompetensi pada 4 Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja yang terampil dan mandiri	DPMPTSP&TK	25 Orang	Rp 147.900.000	DAU	
			Tilongkabia, Bulango selatan	- Pelatihan Mebel Kayu (15 Orang)	Rp 40.457.500		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
			Kabila Bone, Bonpai, Bulawa, Bonray, Bone	- Pelatihan komputer (15 Orang)	Rp 34.542.500		
			Suwawa, Kabila	- Pelatihan Menjahit (15 Orang)	Rp 34.900.000		
	Sewa Gedung BLK		Suwawa tengah, Selatan, timur	- Pelatihan Perbengkelan (15 Orang)	Rp 38.000.000		
	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja			2 Kegiatan Bahan dan Materi (Pelatihan Menjahit dan Pelatihan Mebel Kayu)	Rp 60.000.000		
	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan	Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja			Rp 300.000.000		
	Sub Kegiatan : Pelatihan dan Bimbingan Kelompok Usaha Produktif	Jumlah Bantuan Kelompok Usaha Produktif (KUP)	DPMPTSP&TK	5 Kelompok Usaha Produktif	Rp 100.000.000	DAU	
	Kegiatan : Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja		Tilongkabila, Kabila	\$ Kelompok Usaha Produktif	Rp 100.000.000		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Informasi Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	Jumlah Penyusunan Informasi Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	DPMPTSP&TK	25 Lowongan	Rp 40.000.000	DAU	
	Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja		DPMPTSP&TK	25 Lowongan Kerja dari perusahaan dan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Rp 40.000.000		
	Sub Kegiatan : Informasi Pasar Kerja Kepada Pencari Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja Kepada Pencari Kerja	DPMPTSP&TK	1 Paket	Rp 30.000.000	DAU	
	Kegiatan : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan		DPMPTSP&TK	Leaflet, Stiker, Baliho dan Spanduk pada Bursa Kerja	Rp 30.000.000		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pembinaan Ketenagakerjaan dilembaga pendidikan (Angkatan	Jumlah Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan	DPMPTSP&TK	1 Kegiatan Sosialisasi	Rp 40.000.000	DAU	
	Kegiatan : Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai		SMA / SMK dan Lembaga Pelatihan Kerja	1 Kali	Rp 40.000.000		
	Sub Kegiatan : Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah tenaga yang siap pakai	DPMPTSP&TK	32 Orang	Rp 50.000.000	DAU	
	Kegiatan : Pengembangan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan		Suwawa Tengah, Botupingge	1 Kali	Rp 50.000.000		
	Sub Kegiatan : Pengembangan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Tenaga kerja berwirausaha	DPMPTSP&TK	25 Orang	Rp 40.000.000	DAU	
	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Bulango Selatan, Tapa, suwawa	1 Fasilitas Pada Wirausaha baru	Rp 40.000.000		
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan	Pronsetase Penyelesaian Kasus HI (Hubungan Industrial)			Rp 250.000.000		
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Tentang Perlindungan Tenaga Kerja dan Penegakkan Hukum (BPJS)	Jumlah Sosialisasi tentang perlindungan dan penegakkan Hukum	DPMPTSP&TK	1 Kali (25 Orang)	35.000.000	DAU	
	Kegiatan : Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial			25 Orang	35.000.000		
	Sub Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan Antara perusahaan dan pekerja	Jumlah Kasus perselisahan HI yang diselesaikan	DPMPTSP&TK	5 Kasus	Rp 25.000.000	DAU	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			5 kasus	Rp 25.000.000		
	sub Kegiatan : Monev	Jumlah Perusahaan yang telah membuat peraturan perusahaan, mengikutsertakan pekerja pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pelaksanaan UMP dan	DPMPTSP&TK	4 Laporan Perusahaan	Rp 40.000.000	DAU	
	Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan				Rp 40.000.000		
	Sub Kegiatan : Sosialisasi berbagai Peraturan ketenagakerjaan	Jumah Peserta Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	DPMPTSP&TK	100 Orang	Rp 100.000.000	DAU	
	Pembentukan Tim Tripartite (Pemerintah, Pemilik Perusahaan			3 kali	Rp 85.000.000		
	Kegiatan : Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja			1 Kali Pembentukan	Rp 15.000.000		
	Sub Kegiatan : Pelaporan dan Pemantauan Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja	Jumlah Pelaporan dan Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga	DPMPTSP&TK	8 Perusahaan	Rp 50.000.000	DAU	
					Rp 50.000.000		
					#REF!		

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan		Rencana Tahun 2018			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	

DRS.RUSLIY MOKODONGAN, MM

NIP. 19621226 199007 1 002

TABEL 2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Perizinan Pada BPMPTSP	Produk Perizinan Masih Mudah untuk di Duplikasi dan atau dimanipulasi/ ditiru	1) Kepmenpan No. 63/Kep./M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2) PerMenPan dan RB No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. 3) PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.	Belum didukung oleh sarana operasional berbasis teknologi	Tuntutan Kemajuan teknologi yang semakin modern	Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik yang dapat menunjang pengawasan dan pengendalian
			Kemampuan pegawai yang kurang memadai.	Dukungan politik dalam pengembangan SDM aparatur SKPD/ REgulasi yang Dinamis	Kurangnya pengembangan SDM aparatur SKPD
			Peningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	Dukungan politik terhadap sarana dan prasaran pelayanan public	Belum optimalnya sarana dan prasaran pelayanan publik
Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri	Investasi PMDN dan PMA belum maksimal	1) Perpres Nomor 16 Tahun 2012 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015	Sosialisasi /promosi potensi yang belum maksimal	Sarana penyebarluasan informasi potensi daerah	Belum optimalnya promosi potensi daerah dalam pengembangan investasi di daerah
			Tenaga Teknis Penelitian/SDM belum memadai	Kurangnya tenaga teknis peneliti dalam Pengembangan investasi daerah	Belum optimalnya pengembangan penelitian potensi daerah
Pengendalian dan pengawas bagi pelaku usaha	Koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian	1) Perpres Nomor 16 Tahun 2012 2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 3) Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015	Produk hukum daerah yang belum ada sarana pendukung untuk pengaduan belum ada	Dukungan politik dalam penyusunan peraturan dan atau produk hukum daerah tentang perizinan Partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaku usaha belum maksimal	Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah dalam perizinan dan non perizinan Belum optimlanya dukungan sarana pengaduan bagi masyarakat

TABEL 3. IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkembangan Teknologi Informasi Dunia	Pelayanan secara elektronik	Pelayanan secara elektroni dan berbasis web	Peluang kerja sama dengan pihak perguruan tinggi daerah dalam pengmebangan industry kretif
2	Lahan investasi hampir semua bidang di Indonesia cukup besar	Kemudahan izin investasi 3 Jam di BKPM	Belum adanya kajian potensi daerah Fisibility Study (FS)	Peluang kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam penelitian potensi daerah
3	Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	Nawa Cita Presiden untuk peningkatan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Publik (infrastruktur daerah)	Kerja sama dengan pihak penegak hukum dalam penegakan peraturan perundangan yang berlaku
4	Jumlah Penduduk Indonesia sangat banyak	Peningkatan Koordinasi dan Harmonisasi antara Pusat dan daerah	Potensi Daerah Belum terpromosi secara baik	Banyaknya sarana public dapat untuk melkukan promosi
5	Indonesia merupakan negara	Target investasi	Persaingan Investasi antar daerah semakin	Penemuan baru tentang energy terbarukan

	berkembang	Nasional naik 2 kali lipat dari target tahun sebelumnya	banyak	
--	------------	---	--------	--

TABEL 4.
RKPD PERUBAHAN 2017
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					SETELAH PERUBAHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program dan Kegiatan Setiap SKPD					Program dan Kegiatan Setiap SKPD					
1,1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Layanan Administrasi perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Layanan Administrasi perkantoran			
1	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	DPMP TSP&TK	Jumlah Belanja Operasional Administrasi Perkantoran	12 Bulan	436.710.000	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	DPMP TSP&TK	Jumlah Belanja Operasional Administrasi Perkantoran	12 Bulan	415.722.394	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	DPMP TSP&TK	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	12 Bulan	56.585.000	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	DPMP TSP&TK	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	12 Bulan	107.450.406	
1,2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai			
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMP TSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	16 Unit	91.505.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMP TSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	16 Unit	94.485.000,00	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMP TSP&TK	Prosentase Peningkatan Mutu SDM bagi Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMP TSP&TK	Prosentase Peningkatan Mutu SDM bagi Aparatur			
2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMP TSP&TK	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	10.000.000,00	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMP TSP&TK	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	4.820.000,00	
1,4	Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi		Prosentase Kegiatan Promosi dan Kerjasama			Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi		Prosentase Kegiatan Promosi dan Kerjasama			
1,5	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	DPMP TSP&TK	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan antara investor dan pemerintah	1 Kali Temu Investor	29.275.000,00	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	DPMP TSP&TK	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan antara investor dan pemerintah	1 Kali Temu Investor	23.375.000,00	
2	Peningkatan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	DPMP TSP&TK	Jumlah Perusahaan PMA, PMDN yang diawasi	30 Perusahaan	18.315.000,00	Peningkatan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	DPMP TSP&TK	Jumlah Perusahaan PMA, PMDN yang diawasi	30 Perusahaan	13.495.000,00	

	Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi		Meningkatnya investasi daerah			Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi		Meningkatnya investasi daerah			
	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMTSP&TK	Jumlah Waktu Penyelesaian Izin sesuai SOP	128 Menit	93.600.000,00	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMTSP&TK	Jumlah Waktu Penyelesaian Izin sesuai SOP	128 Menit	38.600.000,00	
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	DPMTSP&TK	Jumlah Izin Yang terbit	1280 Izin	126.350.000,00	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	DPMTSP&TK	Jumlah Izin Yang terbit	1280 Izin	161.950.000,00	
	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja		Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja			Program : Peningkatan Kesempatan Kerja		Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja			
	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	DPMTSP&TK	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok usaha Produktif dan yang difasilitasi	150 Orang		Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	DPMTSP&TK	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok usaha Produktif dan yang difasilitasi	150 Orang		
	- Bantuan KUP		Jumlah Kelompok Usaha Produktif	3 Kelompok	40.000.000,00	- Bantuan KUP	3 Kelompok	Jumlah Kelompok Usaha Produktif	3 Kelompok	39.000.000,00	
	- SPPD Dalam Daerah			5 Orang	5.970.000,00	- SPPD Dalam Daerah			5 Orang	6.970.000,00	
	Kegiatan : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	DPMTSP&TK	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan	450 Orang	1.000.000,00	Kegiatan : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	DPMTSP&TK	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan	450 Orang	1.000.000,00	
	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Pronsetase Penyelesaian Kasus HI (Hubungan Industrial			Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Pronsetase Penyelesaian Kasus HI (Hubungan Industrial			
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	DPMTSP&TK	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan	50 Orang	16.230.000	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	DPMTSP&TK	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan	50 Orang	16.230.000	

	Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	DPMPTSP&TK	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial)	50 Orang	26.090.000	Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	DPMPTSP&TK	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial)	26.090.000	
	TOTAL				951.630.000,00				949.187.800,00	

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO**

DRS.RUSLIY MOKODONGAN, MM
NIP. 19621226 199007 1 002

TABEL 4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWALRKPD TAHUN 2018
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program dan Kegiatan Setiap SKPD					Program dan Kegiatan Setiap SKPD				250.000.000,00	
1,1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Layanan Administrasi perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Layanan Administrasi perkantoran			
1	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	DPMP TSP&TK	Jumlah Belanja Operasional Administrasi Perkantoran	12 Bulan	557.107.740	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Administrasi Perkantoran	DPMP TSP&TK	Jumlah Belanja Operasional Administrasi Perkantoran	12 Bulan	557.107.740	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	DPMP TSP&TK	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	12 Bulan	125.996.378	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah	DPMP TSP&TK	Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar daerah yg diikuti	12 Bulan	125.996.378	
1,2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai			
1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMP TSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	16 Unit	140.000.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	DPMP TSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	16 Unit	140.000.000,00	
1	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	DPMP TSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Perlengkapan kantor yang diadakan dan dipelihara	10 unit	259.194.303,00	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	DPMP TSP&TK	Jumlah Kendaraan Dinas, Peralatan, Perlengkapan kantor yang diadakan dan dipelihara	10 unit	259.194.303,00	
1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPMP TSP&TK	Prosentase Meningkatkan Disiplin Aparatur			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPMP TSP&TK	Prosentase Meningkatkan Disiplin Aparatur			
1	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	DPMP TSP&TK	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas dan pakaian olahraga	160 Stel	82.900.000,00	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	DPMP TSP&TK	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas dan pakaian olahraga	160 Stel	82.900.000,00	
1	Pengadaan pakaian Hari-hari tertentu	DPMP TSP&TK	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian kerja lapangan	80 Stel	28.900.000,00	Pengadaan pakaian Hari-hari tertentu	DPMP TSP&TK	Jumlah Aparatur yang mendapatkan pakaian kerja lapangan	80 Stel	28.900.000,00	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMP TSP&TK	Prosentase Peningkatan Mutu SDM bagi Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMP TSP&TK	Prosentase Peningkatan Mutu SDM bagi Aparatur			

2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMPTSP&TK	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	100.000.000,00	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	DPMPTSP&TK	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	100.000.000,00
1,3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan		
1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP&TK	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja	6 Dokumen	23.388.750,00	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP&TK	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja	6 Dokumen	23.388.750,00
2	Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	DPMPTSP&TK	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2 Dokumen	12.899.250,00	Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	DPMPTSP&TK	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	2 Dokumen	12.899.250,00
1,4	Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi		Prosentase Kegiatan Promosi dan Kerjasama			Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi		Prosentase Kegiatan Promosi dan Kerjasama		
1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	DPMPTSP&TK	Jumlah Buku Profil Promosi Potensi Unggulan Daerah yang Dibuat	75 Buku Profil	100.000.000,00	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	DPMPTSP&TK	Jumlah Buku Profil Promosi Potensi Unggulan Daerah yang Dibuat	75 Buku Profil	100.000.000,00
1,5	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan antara investor dan pemerintah	1 Kali Temu Investor	250.000.000,00	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan antara investor dan pemerintah	1 Kali Temu Investor	250.000.000,00
1	Penyelenggaraan Pameran Investasi	DPMPTSP&TK	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Pameran	50.000.000,00 150.000.000,00	Penyelenggaraan Pameran Investasi	DPMPTSP&TK	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Pameran	50.000.000,00 150.000.000,00
2	Peningkatan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	DPMPTSP&TK	Jumlah Perusahaan PMA, PMDN yang diawasi	30 Perusahaan		Peningkatan kegiatan Pemantauan, pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PM	DPMPTSP&TK	Jumlah Perusahaan PMA, PMDN yang diawasi	30 Perusahaan	
	Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi		Meningkatnya investasi daerah			Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi		Meningkatnya investasi daerah		
	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jumlah Waktu Penyelesaian Izin sesuai SOP	128 Menit	117.000.000,00	Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jumlah Waktu Penyelesaian Izin sesuai SOP	128 Menit	117.000.000,00
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jumlah Izin Yang terbit	1280 Izin	253.607.813,00	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP&TK	Jumlah Izin Yang terbit	1280 Izin	253.607.813,00
	Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Prosentase Pencari Kerja yang ditingkatkan kualitasnya			Program : Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Prosentase Pencari Kerja yang ditingkatkan kualitasnya		

	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	DPMPTSP&TK	Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	270.000.000,00	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	DPMPTSP&TK	Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	270.000.000,00	
	Program : Peningkatan Kesempatan Kerja		Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja			Program : Peningkatan Kesempatan Kerja		Prosentase Peningkatan Kesempatan Kerja			
	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	DPMPTSP&TK	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok usaha Produktif dan yang difasilitasi	150 Orang	470.000.000,00	Kegiatan : Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	DPMPTSP&TK	Jumlah Peserta Bimtek Kelompok usaha Produktif dan yang difasilitasi	150 Orang	470.000.000,00	
	Kegiatan : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP&TK	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan	450 Orang	1.000.000,00	Kegiatan : Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP&TK	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Ketenaga Kerjaan di Lembaga Pendidikan	450 Orang	1.000.000,00	
	Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Pronsetase Penyelesaian Kasus HI (Hubungan Industrial			Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Pronsetase Penyelesaian Kasus HI (Hubungan Industrial			
	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	DPMPTSP&TK	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan	50 Orang	100.000.000	Kegiatan : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	DPMPTSP&TK	Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan	50 Orang	100.000.000	
	Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	DPMPTSP&TK	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial)	50 Orang	100.000.000	Kegiatan : Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	DPMPTSP&TK	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial)	50 Orang	100.000.000	

	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Prosentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Prosentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi			
	Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	DPMPTSP&TK	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dengan sosialisasi pengembangan ekonomi	1 Paket	150.000.000	Kegiatan : Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	DPMPTSP&TK	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dengan sosialisasi pengembangan ekonomi	1 Paket	150.000.000	
	TOTAL				3.341.994.234,00					3.341.994.234,00	